

**ITIKAD TIDAK BAIK TERKAIT PIHAK YANG MENYEBABKAN
KERUGIAN MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG
OTORITAS JASA KEUANGAN**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

ARDITA INDAH LUKITASARI
NIM: 115010107111058



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2016**

**ITIKAD TIDAK BAIK TERKAIT PIHAK YANG MENYEBABKAN
KERUGIAN MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG
OTORITAS JASA KEUANGAN**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

**ARDITA INDAH LUKITASARI
NIM: 115010107111058**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2016**

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

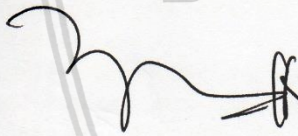
ITIKAD TIDAK BAIK TERKAIT PIHAK YANG MENYEBABKAN
KERUGIAN MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG
OTORITAS JASA KEUANGAN


ARDITA INDAH LUKITASARI
115010107111058

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji pada tanggal 27 Juni 2016
dan disahkan pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Sentot Prihandajani Sigito, S.H., M.Hum.
NIP. 196004231986011002


Moch. Zairul Alam, S.H., M.H.
NIP. 197409092006041002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Ketua Bagian
Hukum Perdata


Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si.
NIP. 196208051988021001


Dr. Budi Santoso, S.H., LL.M.
NIP. 197206222005011002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

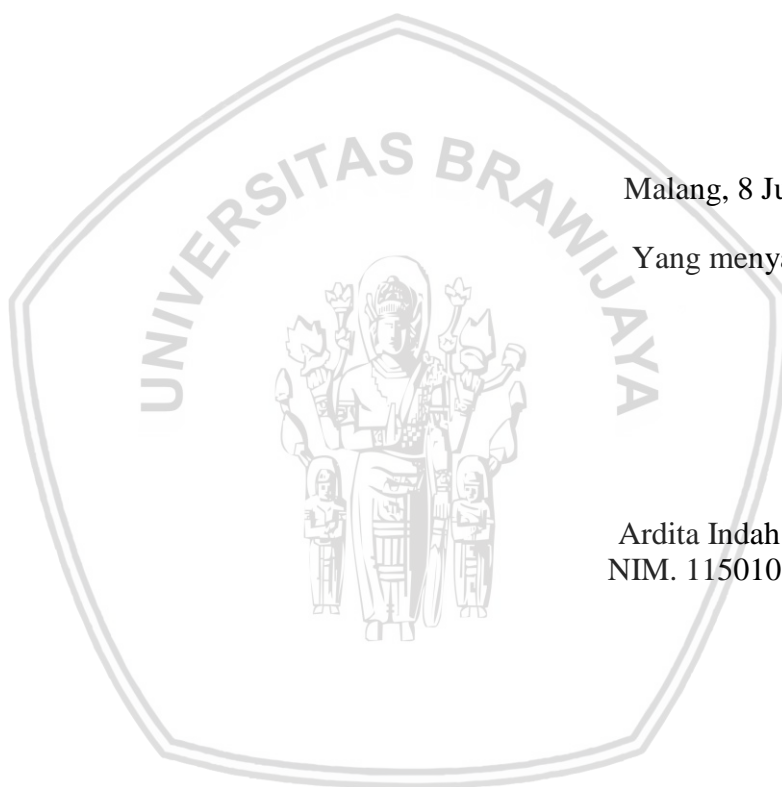
Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa karya ilmiah hukum ini adalah hasil kerja saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Jika di kemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain, saya sanggup dicabut atas gelar kesarjanaan saya.

Malang, 8 Juni 2016

Yang menyatakan,

Ardita Indah Lukitasari
NIM. 115010107111058



KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terimakasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Rachmad Syafa'at, S.H.,M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Budi Santoso, S.H., LL.M selaku Ketua Bagian Hukum Perdata
3. Bapak Sentot P. Sigito, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Utama, terimakasih atas waktu, bimbingan dan kesabarannya dalam membimbing saya.
4. Bapak M.Zairul Alam, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Pendamping, terimakasih atas waktu, bimbingan, motivasi dan kesabarannya dalam proses bimbingan.
5. Segenap Dosen dan staff Fakultas Hukum Brawijaya
6. Kedua orang tua saya yang tercinta Bapak Bambang Rumawanto dan Ibu Ida Sari Wardhani yang selalu memberikan perhatian, motivasi, support, bimbingan dan juga tekanan batin untuk cepat selesai mengerjakan skripsi serta Adik saya Yoga Adhi A yang selalu bawel dan tak henti-henti menyemangati saya, tak luput juga segenap keluarga besar yang tetap mendukung saya.
7. Para teman-teman yang masih setia menyemangati dan ikut ribet dalam proses ini. Kak Hanugrah Titi H.S.SH., Suchi Anggraeni , Masissa, Merynda Wijayanti yang ngotot pingin namanya ingin ditulis disini, Para Wotaku Yesica,S.H., dan Alm.Ganjar S.H.,Makasih yo rekkk.. aku sayang kalian..
8. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, makasih untuk suport dan saran-saran ajaib kalian.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik dibutuhkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukan jalan yang benar.

Malang, 30 Juli 2016

Ardita Indah Lukitasari

RINGKASAN

Ardita Indah Lukitasari, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juni 2016 ITIKAD TIDAK BAIK TERKAIT PIHAK YANG MENYEBABKAN KERUGIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG Otoritas JASA KEUANGAN, Sentot P. Sigito, S.H., M.Hum, M. Zairul Alam, S.H., M.H.

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan penafsiran mengenai itikad tidak baik terkait pihak yang menyebabkan kerugian menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh belum adanya kejelasan definisi mengenai itikad tidak baik terkait pihak yang menyebabkan kerugian dari segi Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan hal tersebut, karya tulis ini mengangkat sebuah rumusan masalah yaitu : Bagaimana Otoritas Jasa Keuangan memberikan penafsiran mengenai itikad tidak baik terkait dengan pihak yang menyebabkan kerugian yang terdapat dalam Pasal 30 ayat (1) butir b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan?

Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan penafsiran Hukum. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis interpretasi atau penafsiran terhadap semua bahan hukum, yaitu suatu metode analisis bahan hukum dengan cara menafsirkan pengertian dari itikad tidak baik terkait pihak yang menyebabkan kerugian menurut Otoritas Jasa Keuangan.

Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas rumusan masalah yang ditulis, bahwa definisi dari itikad tidak baik adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan itikad baik dan diindikasikan sebagai bentuk itikad tidak baik secara mendasar. Untuk mendefinisikan itikad tidak baik terkait pihak yang menyebabkan kerugian agar lebih mendetail, harus dilihat dulu dari kasus yang sedang dihadapi. Itikad tidak baik memiliki definisi yang luas, sehingga perlu tindakan khusus untuk menyikapi penafsiran tersebut. Otoritas Jasa Keuangan lebih menitik beratkan penafsiran itikad tidak baik kepada para pihak yang menyebabkan kerugian dalam sektor jasa keuangan.

SUMMARY

Ardita Indah Lukitasari, Private Business Law, Faculty of Law, University of Brawijaya, June 2016 BAD FAITH THAT CAUSES LOSSES ACCORDING TO LAW NUMBER 21 OF 2011 CONCERNING THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY, Sentot P. Sigito, S.H., M.Hum, M. Zairul Alam, S.H., M.H.

In this thesis, the author raises the problem of interpretation of bad faith that causes losses according to law number 21 of 2011 concerning the financial services authority. The choice of the theme was motivated by the lack of clarity in the definition of bad faith related to the party that caused the loss in terms of the Financial Services Authority.

Based on this, this paper raises a problem formulation, namely: How does the Financial Services Authority provide an interpretation of bad faith related to the party that caused the loss contained in Article 30 paragraph (1) item b of Act Number 21 of 2011 concerning Service Authority Finance?

Then the writing of this paper uses a normative juridical method with the approach method of Law - Invitation (statute approach) and interpretation of the Law approach. Primary, secondary, and tertiary legal materials obtained by the author will be analyzed using analysis techniques of interpretation or interpretation of all legal materials, namely a method of analyzing legal materials by interpreting the meaning of bad faith related to the party causing the loss according to the financial services authority.

From the results of research with the above method, the author obtains an answer to the formulation of the problem written, that the definition of bad faith is that any act that is contrary to good faith and indicated as a form of bad faith is fundamentally. To define bad faith regarding the party that caused the loss to be more detailed, it must be seen first from the case at hand. Bad intentions have broad definitions, so special actions are needed to address these interpretations. The Financial Services Authority emphasizes the interpretation of bad faith to parties causing losses in the financial services sector.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| Lembar Pengesahan | i |
| Pernyataan Keaslian Skripsi | ii |
| Kata Pengantar | iii |
| Ringkasan | iv |
| Summary | v |
| Daftar Isi | vi |
| Daftar Gambar | vii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 8 |
| D. Manfaat Penelitian | 8 |
| E. Sistematika Penulisan | 9 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian | 11 |
| B. Tinjauan Umum Mengenai Otoritas Jasa Keuangan | 29 |
| C. Tinjauan Umum Mengenai Itikad Tidak Baik | 35 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Jenis Penelitian | 37 |
| B. Metode Pendekatan | 37 |
| C. Jenis Data dan Sumber Bahan Hukum | 38 |
| D. Teknik Memperoleh Bahan Hukum | 39 |
| E. Teknik Analisis Bahan Hukum | 39 |
| F. Definisi Konseptual | 40 |
| BAB IV PEMBAHASAN | |
| A. Penafsiran itikad tidak baik terkait pihak yang menyebabkan kerugian dalam Otoritas Jasa Keuangan | 41 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 63 |
| B. Saran | 64 |
| DAFTAR PUSTAKA | 65 |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 1. Siklus Edukasi | 58 |
| Gambar 2. Macam-Macam Cara Pelaporan Dan Pengaduan | 59 |
| Gambar 3. Mekanisme Penerimaan dan Penanganan | 69 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini perjanjian sudah berkembang pesat sebagai konsekuensi logis dari berkembangnya kerjasama bisnis antar pelaku bisnis. Banyak kerjasama yang dilakukan oleh para pelaku bisnis dalam bentuk kontrak atau perjanjian tertulis. Pada dasarnya Perjanjian berawal dari perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan di antara para pihak. Perjanjian tersebut menjadi instrument untuk mengakomodir atau mempertemukan kepentingan yang berbeda antara dua pihak atau lebih. Sebuah perjanjian diawali dengan proses negosiasi di antara para pihak.

Melalui negosiasi para pihak, mereka berupaya menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses tawar-menawar dan melalui perjanjian, perbedaan tersebut diakomodasi dan selanjutnya dibingkai dengan perangkat hukum yang mengikat para pihaknya. Dalam Kontrak bisnis pertanyaan mengenai sisi kepastian dan keadilan justru akan tercapai apabila perbedaan yang ada di antara para pihak terakomodasi melalui mekanisme hubungan kontraktual yang bekerja secara proposional.¹

Hukum perjanjian merupakan hukum pelengkap. Dikatakan hukum pelengkap di sini adalah norma-norma hukum yang melengkapi pengaturan hukum perjanjian yang dibuat sendiri oleh para pihaknya berdasarkan sebuah

¹ Agus Yudha Hernoko, **Hukum Perjanjian: Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersal**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, Hlm. 1.

kesepakatan. Perjanjian atau Kontrak diatur secara khusus ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian, salah satunya diatur di dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi :

“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau beberapa orang yang mengikatkan dirinya terhadap suatu orang lain atau lebih”

Sebuah perjanjian dapat disebut sebagai perjanjian sepenuhnya jika telah memenuhi syarat-syaratnya yang terdapat di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berisi mengenai :

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Adanya ke empat syarat tersebut, maka perjanjian akan dianggap sah dan tidak dapat diganggu kecuali ada kesepakatan lain yang dibuat oleh para pihak (subyek hukum) untuk mengakhiri atau membatalkannya. Perjanjian yang kini berkembang, mulai merambah masuk ke dalam Sektor Jasa Keuangan.

Mereka menggunakan perjanjian sebagai akad atau syarat dalam sebuah transaksi (jika terjadi jual - beli) yang dilakukan agar terikat dan dilindungi oleh hukum. Namun kenyataannya, perjanjian yang telah dibuat dan mengikat dalam hukum tetap saja dilanggar. Salah satu contohnya adalah Pengingkaran janji (Wanprestasi), kerugian yang disebabkan oleh wanprestasi atau oleh perbuatan melawan hukum itu disebabkan oleh salah satu pihak atau beberapa pihak yang telah mengingkari perjanjian yang dibuat. Para pihak

dalam pembuatan perjanjian wajib untuk dilindungi termasuk juga dari pihak konsumen (jika menyangkut perjanjian jual - beli) yang harus dilindungi hak-haknya.

Berbicara mengenai Hak Kosumen, dalam Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang dimaksud dengan konsumen menurut lembaga jasa keuangan adalah para pihak yang telah menempatkan dananya atau memanfaatkan pelayanan Lembaga Jasa Keuangan. Contohnya seperti nasabah pada perbankan, pemodal dalam pasar modal, pemegang polis pada perasuransian, dan peserta dana pensiun, yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.²

Untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran terhadap konsumen jasa keuangan maka selain menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan juga menyisipkan pasal tambahan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan masyarakat di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan untuk melindungi hak-hak konsumen yang tertuang dalam Pasal 28 hingga Pasal 31 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dan ditambah dengan peraturan lainnya yang mendukung.

Dalam pasal-pasal tersebut Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan melakukan pembelaan hukum yang tertera dalam Pasal 30

² Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5253

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yang berbunyi :

“Pasal 30

- (1) Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pembelaan hukum, yang meliputi:
 - a. Memberikan perintah atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan Konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud;
 - b. Mengajukan gugatan:
 1. Untuk mendapatkan kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang telah menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang telah menyebabkan kerugian maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik; dan/atau
 2. Untuk mendapatkan ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
- (2) Ganti kerugian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b angka 2 hanya digunakan untuk pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan."

Pada Pasal 30 ayat (1) huruf b angka 1 menjelaskan tentang penguasaan harta yang digunakan pihak yang membuat kerugian baik harta yang berada di bawah penguasaan pihak pembuat kerugian itu sendiri maupun yang tidak berada di bawah penguasaan pihak lain di luar kedua belah pihak yang dimiliki dengan itikad tidak baik.

Namun ada satu hal yang menjadi kekurangan pada Pasal 30 ini, yaitu tidak adanya penjelasan mengenai frasa itikad tidak baik terkait pihak yang menyebabkan kerugian. Apakah pengertian dari itikad tidak baik ini adalah lawan dari pengertian itikad baik ataukah memiliki pengertian tersendiri. Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf b angka 1 Undang-Undang

Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan “itikad tidak baik” adalah itikad tidak baik berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan”.

Penilaian itikad tidak baik terkait pihak yang menyebabkan kerugian oleh Otoritas Jasa Keuangan tidak disebutkan secara jelas dalam penjelasan tersebut. Otoritas Jasa Keuangan tidak memberikan penjelasan yang signifikan dan dapat menimbulkan kekaburan hukum dikarenakan tidak ada penjelasan secara pasti mengenai definisi dari itikad tidak baik terkait pihak yang menyebabkan kerugian.

Di bawah ini adalah penelitian terdahulu mengenai itikad tidak baik :

| No | Tahun penelitian | Nama peneliti dan asal instansi | Judul Penelitian | Rumusan Masalah | Keterangan |
|----|------------------|---|--|---|---|
| 1 | 2014 | Charles Yeremia Far-Far, Universitas Brawijaya Malang | Tinjauan Yuridis Pembatalan Merek Dagang Terdaftar Terkait Prinsip Itikad Baik (Good Faith) Dalam Sistem Pendaftaran Merek (Studi Putusan No. 356 K/Pdt.Sus-Haki/2013) | 1.Bagaimana keterkaitan prinsip itikad baik pada pembatalan merek terdaftar dalam sistem pendaftaran merek menurut Undang-Undang Merek Tahun 2001? 2.Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam putusan Nomor. 356K/Pdt.Sus-Haki/2013 pada perkara pembatalan merek dagang | Skripsi ini menjelaskan tentang kajian hukum asas itikad baik dalam sebuah perjanjian yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan juga dalam Undang - Undang Merek. |

| | | | | | |
|---|------|--|--|--|---|
| | | | | terkait prinsip itikad baik (<i>good faith</i>) dalam sistem pendaftaran merek ? | |
| 2 | 2014 | Reski Adijaya, Universitas Brawijaya | Pola Pengawasan Bank umum berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Universitas Brawijaya | Bagaimana pola pengawasan bank umum berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan ? | Dalam skripsi ini menjelaskan tentang Otoritas Jasa Keuangan dari segi fungsi dan kewenangannya. |
| 3 | 2015 | Shinta Kusumaningtyas Putri, Universitas Negeri Diponogoro | Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank yang Melakukan pelanggaran Prinsip kehati-hatian (Studi pada putusan No. 1111K/Pdt/2013 | 1. Bagaimana tanggung jawab Bank Mega terhadap pencairan dana deposito tanpa seizin PT. Elnusaa selaku pemilik dana tersebut ? 2. Bagaimana kewenangan yang dilakukan terhadap putusan mahkamah agung No. 1111K/Pdt./2013 yang belum dijalankan oleh Bank Mega tersebut ? | Dari skripsi ini menjelaskan mengenai kewenangan Otoritas Jasa Keuangan terhadap pelanggaran prinsip kehati-hatian bank |

Dari penjelasan di atas penulis ingin menjelaskan mengenai penafsiran tentang itikad tidak baik terkait pihak yang menyebabkan kerugian menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Maka dalam penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan tentang penafsiran dari itikad tidak baik terkait pihak yang menyebabkan kerugian menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Penulis mengambil judul “ Itikad Tidak Baik Terkait Pihak Yang menyebabkan Kerugian Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan dalam Latar Belakang sebelumnya, maka agar tulisan ini dapat tersusun secara sistematis dan terarah terdapat rumusan masalah yang menjadi permasalahan utama dalam tulisan ini yakni :

1. Bagaimana Otoritas Jasa Keuangan memberikan penafsiran mengenai itikad tidak baik terkait dengan pihak yang menyebabkan kerugian yang terdapat dalam Pasal 30 ayat (1) butir b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan penafsiran hukum terhadap itikad tidak baik terkait dengan pihak yang menyebabkan kerugian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b angka 1 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yaitu :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan ilmu hukum perdata terkait asas itikad baik sebagai kajian akademik dalam memberikan gagasan yang kritis dan solutif.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Otoritas Jasa Keuangan

Penulisan skripsi ini dapat dijadikan dasar pertimbangan pengambilan kebijakan terkait dengan asas itikad baik yang tertera dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

- b. Bagi Pemerintah

Penulisan skripsi ini dapat dijadikan sebagai bahan hukum bagi pemerintah dalam menganalisis dan mengevaluasi kebijakan

yang diambil oleh Otoritas Jasa Keuangan yang berkaitan dengan asas itikad baik

c. Bagi Fakultas Hukum

Penulisan skripsi ini dapat dijadikan sebagai literatur dalam mengkaji suatu permasalahan yang berkaitan dengan asas itikad baik dalam Otoritas Jasa Keuangan.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika ini berguna untuk memberikan gambaran yang jelas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan, secara sistematis susunan metodologi penelitian penulisan hukum adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Lima sub Bab yang terdiri dari

- a. Latar Belakang
- b. Rumusan Masalah
- c. Tujuan Penelitian
- d. Manfaat Penelitian,
- e. Sistematika Penulisan

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tentang argumentasi ilmiah / teori, pendapat para ahli yang berasal dari referensi yang sahih. Kajian dalam penelitian ini terdiri dari beberapa sub Bab yang berisi kajian tentang Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian, Tinjauan Umum Mengenai Otoritas Jasa Keuangan, Tinjauan Umum Mengenai Itikad Tidak Baik

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari enam metode yaitu:

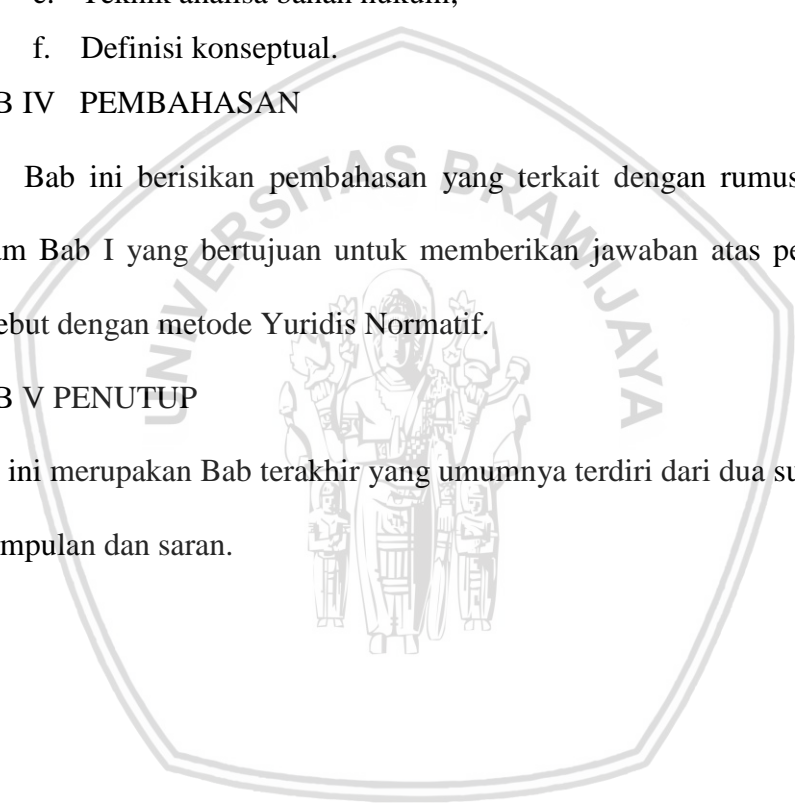
- a. Jenis penelitian;
- b. Pendekatan penelitian;
- c. Jenis dan sumber bahan hukum;
- d. Teknik memperoleh bahan hukum;
- e. Teknik analisa bahan hukum;
- f. Definisi konseptual.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini berisikan pembahasan yang terkait dengan rumusan masalah dalam Bab I yang bertujuan untuk memberikan jawaban atas permasalahan tersebut dengan metode Yuridis Normatif.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan Bab terakhir yang umumnya terdiri dari dua sub Bab yaitu kesimpulan dan saran.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian

1. Subyek Hukum

Subyek hukum adalah “Setiap pihak yang menjadi pendukung hak dan kewajiban dalam melakukan hubungan hukum. Subyek hukum berhak atas hak-hak subyektif dan pelaku dalam hukum Obyektif”.¹ Ilmu hukum mengenal adanya dua pihak yang bertindak sebagai subyek hukum, yaitu :

- a) Manusia sebagai *natuurlijk persoon*, merupakan subyek hukum alamiah dan bukan hasil kreasi manusia, tetapi ada kodrat ;
- b) Badan Hukum sebagai *recht persoon*, merupakan subyek hukum yang menghasilkan kreasi hukum.²

Semua orang tanpa kecuali adalah subyek hukum, namun dalam hukum memberikan beberapa golongan oleh hukum yang dinyatakan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, sehingga mereka harus diwakili atau dibantu oleh orang lain. Dalam Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mereka yang oleh hukum dinyatakan tidak cakap melakukan perbuatan hukum sendiri, adalah :

- a) Orang yang belum dewasa
- b) Orang yang ditaruh di bawah pengampuan (*curatele*)
- c) Orang perempuan dalam pernikahan

¹ Chidir Ali, **Badan Hukum**, PT.Alumni, Bandung, 2005, Hlm. 6.

² Jono, **Hukum Kepailitan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm. 51.

Selain manusia, dalam hukum terdapat pula badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan yang juga dapat mempunyai hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti layaknya seorang manusia, mempunyai harta kekayaan sendiri, ikut serta dalam hubungan-hubungan hukum dengan perantara pengurusnya, dan dapat digugat maupun menggugat di pengadilan. Badan atau perkumpulan yang demikian itu dinamakan badan hukum atau *recht persoon*.³

Subyek hukum dalam perjanjian terjadi karena adanya hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua atau lebih manusia atau badan hukum sebagai subyek hukum. Subyek hukum tersebut mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang dalam perjanjian yang mereka buat, yaitu satu pihak yang berkewajiban melaksanakan sebuah prestasi dan yang lain berhak menuntut pelaksanaan prestasi.

Menurut M.Yahya Harahap menjelaskan bahwa menurut teori dan praktik hukum perjanjian, subyek hukum itu sendiri terdiri dari :

- a. Individu yang bersangkutan, yaitu:
 1. *Naturlijke perseoon* atau manusia
 2. *Recht persoon* atau badan hukum
- b. Seseorang atas keadaan tertentu mempergunakan kedudukan atau hak orang lain tertentu.
- c. Pihak yang bersangkutan dapat diganti, yaitu berarti kreditur yang menjadi subyek semula telah ditetapkan dalam sebuah perjanjian, sewaktu-waktu dapat diganti kedudukannya dengan kreditur atau debitur baru, perjanjian ini berbentuk "*aan order*"

³ Subekti, **Pokok-pokok Hukum Perdata**, Intermasa, Jakarta, 1987, Hlm. 21.

atau kontrak atas order dan perjanjian “*aan toonder*” atau perjanjian atas nama atau kepada pemegang surat-surat tagihan hutang.⁴

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam hukum perjanjian yang dapat menjadi subyek hukum adalah individu dengan individu, badan hukum dengan badan hukum. Subyek hukum ini harus berwenang dan cakap untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum perjanjian dalam hubungan-hubungan hukum.

2. Obyek Hukum

Obyek hukum adalah kepentingan bagi subyek hukum, maksudnya adalah obyek hukum itu selain berupa benda yang berwujud nyata (*materiel*) maupun tidak berwujud nyata (*imateriel*) juga dapat berupa perbuatan atau pekerjaan yang merupakan kepentingan bagi subyek hukum, karena hal ini menyangkut pelaksanaan hak dan kewajiban dari subyek hukum dalam hubungan-hubungan hukum dengan subyek hukum lainnya.

Menurut doktrin hukum perjanjian, untuk sahnya suatu perjanjian maka obyek hukum perjanjian harus memenuhi persyaratan hukum, yaitu:

- a) Dapat digunakan;
- b) Dapat diperdagangkan;
- c) Mungkin dilakukan;
- d) Bernilai ekonomis; dan
- e) Dapat dinilai dengan uang.⁵

⁴ M. Yahya Harahap, **Segi-Segi Dasar Hukum Kontrak**, Alumni, Bandung, 1982, Hlm. 13-14.

Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memuat ketentuan imperatif, bahwa obyek hukum perjanjian harus tertentu atau setidaknya dapat ditentukan, kemudian dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memuat ketentuan fakultatif bahwa prestasi itu dari memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Ada tiga macam pemberian prestasi perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu :

- a) Perjanjian yang prestasinya memberikan sesuatu benda atau barang ditegaskan secara normatif dalam Pasal 1237 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b) Perjanjian yang prestasinya dikarenakan berbuat sesuatu ditegaskan secara normatif dalam Pasal 1241 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- c) perjanjian yang prestasinya tidak melakukan sesuatu ditegaskan dalam Pasal 1242 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Agar memiliki ketentuan mengikat secara hukum, menurut Pasal 1320 ayat (3) dan ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka suatu kontrak harus memiliki obyek tertentu dan menurut Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata suatu kontrak tidak diperkenankan bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

3. Perjanjian

Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengertian perjanjian terdapat dalam pasal 1313 yaitu :

⁵ Dr.Muhamad Syaifudin, **Hukum Kontrak**, Mandar Maju, Bandung, 2012, Hlm. 66.

“ Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap suatu orang lain atau lebih”

Untuk memenuhi sebuah perjanjian diperlukan syarat-syarat sah yang mengikat, terdapat dalam Pasal 1320 yaitu terdiri dari:⁶

- a) Sepakat mereka yang mengikat dirinya
- b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c) Suatu hal tertentu
- d) Suatu sebab yang halal

Dengan adanya ke empat syarat tersebut maka sebuah perjanjian sudah dianggap sah dan tak dapat diganggu gugat kecuali ada kesepakatan lain yang dibuat para pihak untuk mengakhirinya atau membatalkannya.

Pengertian perjanjian yang diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memiliki kekurangan, sehingga para ahli memberikan penafsiran tersendiri dalam pengertian sebuah perjanjian untuk melengkapi kekurangan dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Contohnya Teori baru yang di kemukakan oleh *Van Dunne*, menurut teori yang dikemukakannya perjanjian adalah sebuah hubungan hukum antara para pihak berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Teori baru tersebut tidak hanya melihat perjanjian yang berlangsung, tetapi juga harus dilihat perbuatan sebelumnya.⁷

Di negara kita sendiri, para sarjana ahli hukum misalnya memiliki doktrin tersendiri terhadap pengertian perjanjian seperti:

⁶ Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12.

⁷ Salim, **Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, Hlm. 161.

a. Menurut Abdulkadir Muhammad⁸

“ Perjanjian adalah suatu persetujuan yang terjadi antara dua orang atau lebih bertujuan untuk saling mengikat diri dalam melaksanakan suatu hal terkait dengan harta kekayaan. Dalam pengertian di atas, dapat dipahami bahwa adanya hubungan antara para pihak dalam pembuatan perjanjian, yaitu persetujuan antara pihak satu dengan pihak lainnya. Selain itu juga, perjanjian yang dilaksanakan terletak pada harta kekayaan ”

b. Menurut M. Yahya Harahap⁹

“ Pejanjian adalah hubungan hukum yang berkaitan dengan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang memenuhi suatu perstasi ”.

c. Menurut Syahmin AK¹⁰

“ Perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji -janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis ”.

4. Asas-Asas Dalam Perjanjian

Menurut para ahli hukum terdapat lima asas perjanjian, antara lain sebagai berikut :

a. Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*)

Kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang penting dalam hukum perjanjian. Kebebasan ini merupakan bagian dari kehendak bebas, dan hak asasi manusia.¹¹ Dengan kebebasan berkontrak berarti orang dapat membuat hak-hak perseorangan

⁸ Abdul Kadir Muhammad, **Hukum Perikatan**, Alumni, Bandung , 1982, Hlm. 4.

⁹ M. Yahya Harahap, **Segi-Segi Hukum Perjanjian**, Alumni, Bandung, 1986, Hlm. 6.

¹⁰ Syahmin, **Hukum Kontrak Internasional**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hlm. 140.

¹¹ Mariam Darus Badruzaman, **Kompilasi Hukum perikatan**, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2001 Hlm. 86.

yang tidak diatur dalam Kitab Undang–Undang Hukum Perdata, tetapi diatur sendiri dalam pembuatan perjanjian, namun tetap para pihak ini harus membuat perjanjian yang benar dan sah. Pasal-pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata baru dapat mengikat , jika para pihak tidak mengatur sendiri kepentingannya atau mengaturnya dalam pembuatan perjanjian. Kebebasan berkontrak memberikan sebuah jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, di antaranya:¹²

- 1) Bebas untuk menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak
- 2) Bebas untuk menentukan dengan siapa ia akan melakukan sebuah perjanjian
- 3) Bebas menentukan isi atau klausul dalam sebuah perjanjian
- 4) Bebas menentukan bentuk perjanjian
- 5) Kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang -undangan.

b. Asas Konsensualisme (*concensualism*)

Pada mulanya, suatu perjanjian atau kesepakatan harus ditegaskan dengan sumpah, namun pada abad ke- 13 pandangan tersebut telah dihapus oleh gereja, kemudian terbentuklah paham bahwa dengan adanya kata sepakat di antara para pihak, suatu perjanjian sudah memiliki kekuatan mengikat.

¹² Riduan Syahrani, **Rangkuman Intisari Hukum**, Pustaka Kartini, Jakarta 1991, Hlm. 15.

Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mensyaratkan adanya kesepakatan sebagai syarat sahnya suatu perjanjian, meskipun demikian perlu diperhatikan bahwa dalam asas konsensualisme terdapat pengecualian, yaitu dalam perjanjian riil dan perjanjian formil yang mensyaratkan adanya penyerahan atau memenuhi bentuk tertentu yang disyaratkan oleh Undang-Undang.¹³

c. Asas Kepastian Hukum (*pacta sunt servanda*)

Asas *Pacta Sunt Servanda* atau disebut juga dengan asas kepastian hukum, berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas ini merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah Undang-Undang.

Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas *Pacta Sunt Servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi :

“ Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang – Undang bagi mereka yang membuatnya ”¹⁴

Setiap orang yang membuat kontrak, dia terikat untuk memenuhi kontrak tersebut karena mengandung janji-janji

¹³ Herlien Budiono, **Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di bidang Kenotariatan**, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010, Hlm. 29.

¹⁴ Salim, **Hukum Kontrak Teori dan Teknik penyusunan Kontrak**, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, Hlm. 9.

yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya Undang -Undang.¹⁵

d. Asas Itikad Baik (*good faith*)

Asas itikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3)

Kitab Undang–Undang Hukum Perdata yang berbunyi :

“ Suatu perjanjian harus di laksanakan dengan itikad baik ”.

Dengan rumusan itikad baik adalah bahwa suatu perjanjian yang dibuat hendaknya dari sejak perjanjian ditutup, perjanjian tersebut sama sekali tidak dimaksudkan untuk merugikan kepentingan debitur maupun kreditur, maupun pihak lain atau pihak ketiga lainnya di luar perjanjian.¹⁶

Didalam hukum perjanjian, itikad baik mempunyai dua pengertian, yaitu:

- a. Itikad baik dalam pengertian subyektif, merupakan sebuah kejujuran seseorang, yaitu sebuah tindakan seseorang saat diadakan perbuatan hukum.
- b. Itikad baik dalam pengertian obyektif merupakan pelaksanaan suatu perjanjian yang didasarkan pada norma kepatuhan atau sesuatu hal yang dirasa sesuai dengan norma dalam masyarakat.¹⁷

¹⁵ Riduan Syahrani, *Op.cit.*, Hlm. 5.

¹⁶ Kartini Muljadi dan Gunawan Wudjaja , **Seri hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian)**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hlm. 80.

¹⁷ A.Qiram Syamsudin Meliala, **Pokok – Pokok Hukum Perjanjian Berserta Perkembagannya**, Liberty, Yogyakarta, 1985, Hlm. 19.

e. Asas Kepribadian (personality)

Asas personality diatur dan dapat kita temukan dalam ketentuan Pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi :

“ Pada umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu perjanjian daripada untuk dirinya sendiri ”.

Suatu perjanjian hanya meletakkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara para pihak yang membuatnya dan tidak mengikat orang lain (Pihak Ketiga).¹⁸

5. Akibat Hukum Perjanjian

Ada empat macam akibat dari pelaksanaan perjanjian yaitu :

a. Wanprestasi

Kata wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Pengertian wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa.¹⁹

Unsur-unsur wanprestasi antara lain :

- 1) Adanya perjanjian yang sah dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Adanya kesalahan (Karena kelalaian dan kesengajaan)
- 3) Adanya Kerugian

¹⁸ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Op.cit*, Hlm. 15.

¹⁹ Nindyo Pramono, **Hukum Komersil**, Pusat Penerbitan UT, cetakan: 1, Jakarta, 2003, Hlm. 221.

- 4) Adanya sanksi
- 5) Dapat berupa ganti rugi
- 6) Berakibat pembatalan perjanjian
- 7) Peralihan resiko
- 8) Membayar biaya perkara²⁰

b. Sanksi

Apabila debitur melakukan wanprestasi maka ada beberapa sanksi yang dapat dijatuhkan kepada debitur yaitu :

- 1) Membayar kerugian yang diderita kreditur
- 2) Pembatalan perjanjian
- 3) Peralihan resiko
- 4) Membayar biaya perkara apabila diperkarakan dimuka hakim²¹

c. Ganti Kerugian

Ganti kerugian adalah suatu akibat yang dilakukan oleh salah satu pihak dikarenakan telah menyebabkan kerugian kepada pihak yang lain. Kerugian yang harus diganti meliputi kerugian yang dapat diduga dan merupakan akibat langsung dari wanprestasi, yang memiliki hubungan sebab akibat antara wanprestasi dengan kerugian yang diderita.

d. Keadaan Memaksa

Keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya sebuah perjanjian, yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, dimana debitur tidak dapat

²⁰ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, **Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian**, Raja Grafindi Persada, Jakarta, 2003, Hlm. 69.

²¹ Nnindyo Pramono, *Op.Cit*, Hlm. 222.

dipersalahkan dan tidak harus menanggung resiko serta tidak dapat meduga pada waktu persetujuan dibuat. Keadaan memaksa dapat bersifat tetap dan sementara.

Jika bersifat tetap maka berlakunya perikatan berhenti sama sekali. Contohnya seperti barang yang akan diserahkan diluar kesalahan debitur terbakar habis sedangkan keadaan sementara adalah berlaku perikatannya ditunda, misalnya larangan untuk mengirimkan suatu barang dicabut atau barang yang hilang di temukan kembali dan dapat memenuhi prestasi kepada kreditur.

e. Resiko

Pengertian Resiko ini bersifat khusus dalam hukum perjanjian. Hal ini berkaitan dengan ajaran tentang pihak yang harus bertanggung jawab untuk memnggugat membayar ganti rugi dalam hal terjadinya keadaan memaksa yang mengakibatkan debitur atau pihak yang memiliki kewajiban melaksanakan prestasi dalam perjanjian tidak dapat melaksanakan kewajibannya (ingkar janji atau wanprestasi).

Ada dua pendapat ahli hukum mengenai pengertian resiko yaitu:

a. Menurut R. Subekti :

Kewajiban untuk memikul kerugian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang dimaksud dalam perjanjian.²²

²² R. Subekti. *Op.Cit*, Hlm. 144.

b. Menurut Abdul Kadir Muhammad :

Kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi keadaan memaksa, yaitu peristiwa bukan karena kesalahan debitur, yang menimpa benda yang menjadi obyek perikatan atau menghalangi perbuatan debitur memenuhi prestasi.²³

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Resiko dalam hukum perjanjian berhubungan dengan keadaan yang memaksa baru terjadilah sebuah resiko.

B. Tinjauan Umum Mengenai Otoritas Jasa Keuangan

1. Otoritas Jasa Keuangan

Sesuai dengan amanah Pasal 34 Undang-Undang No 23 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 Tentang Bank Indonesia telah lahir sebuah Undang-Undang Nomor. 21 tahun 2011 Tentang Lembaga Otoritas Jasa Keuangan. Undang-Undang tersebut diberlakukan mulai 1 Januari 2013. Lembaga Independen tersebut ditugaskan untuk mengatur dan mengawasi Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank.

Lembaga Keuangan Non-Bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Bursa Efek / Pasar Modal, Modal Ventura, Perusahaan Anjak Piutang, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi. Sejak republik ini berdiri baru pertama kalinya lahir sebuah Lembaga Otoritas Jasa Keuangan yang mengawasi Lembaga Keuangan secara terintegrasi

²³ Abdul Kadir Muhammad, *Op.Cit.*, Hlm. 27.

yaitu lembaga keuangan bank dan non-bank. Lembaga independen tersebut akan mengambil alih tugas pengawasan lembaga keuangan bank dan non-bank yang selama ini dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai pengawas Bank dan Bapepam-LK untuk lembaga keuangan bukan bank sebagaimana disebutkan di atas.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan menjelaskan Otoritas Jasa Keuangan adalah institusi yang bukan hanya menyandang independen, berdiri sendiri, namun wewenangnya juga berbeda dengan wewenang lembaga sebelumnya yakni Bank Indonesia yang selama ini tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan, namun Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan tersebut yang terdapat.²⁴

Otoritas Jasa Keuangan juga memiliki fungsi yaitu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan juga melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap :

- a) Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan
- b) Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan

²⁴ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5253

- c) Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.²⁵

Selain itu Otoritas Jasa Keuangan juga memiliki kewenangan yang di tentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang berbunyi bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Otoritas Jasa Keuangan memiliki wewenang sebagai berikut :

- a. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:

- (1) Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
- (2) Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas dibidang jasa;

- b. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi :

- (1) Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencandangan bank
- (2) Laporan bank terkait dengan kesehatan dan kinerja bank
- (3) Sistem informasi debitur
- (4) Pengujian Kredit (*credit testing*); dan
- (5) Standart akuntansi bank

²⁵ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5253

- c. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi :
 - (1) Manajemen resiko;
 - (2) Tata kelola bank
 - (3) Prinsip mengenai nasabah dan anti pencucian uang;
 - (4) Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan;dan
- d. Pemeriksaan bank

2. Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Konsumen

Beralih fungsi pengawasan perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan memiliki makna tersendiri bagi Otoritas Jasa Keuangan, dengan berjalannya waktu Otoritas Jasa Keuangan selalu memperbaiki perfoma kinerjanya dalam pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan. Saat ini Otoritas Jasa Keuangan memiliki sebuah bidang baru yaitu Edukasi dan Perlindungan Konsumen, bertujuan untuk meminimalisir terjadinya sengketa antara pelaku jasa keuangan dengan nasabah atau konsumen.

Konsumen disini dibatasi dalam lingkup konsumen perbankan atau konsumen dalam jasa keuangan. Konsumen bank atau nasabah tidak lain adalah setiap orang yang terkait dengan penyediaan jasa perbankan. Dalam kondisi ini bank berhadapan dengan masyarakat konsumen yang berarti bank harus melayani nasabah berdasarkan prinsip kehati-hatian.²⁶ Perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan merupakan tuntutan hukum untuk melindungi

²⁶ Yusuf shafi, **Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, Hlm. 41-42.

pihak yang lemah dari kewenangan pihak yang kuat dalam Sektor Jasa Keuangan (misalnya pengusaha).²⁷

Berdasarkan Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan disebutkan bahwa salah satu tugas Otoritas Jasa Keuangan adalah memberikan perlindungan kepada konsumen dan/ atau masyarakat kemudian ditegaskan kembali di dalam Pasal 28 hingga Pasal 31 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan yang berisi langkah pencegahan dan pemberantasan.

Tidak hanya dalam rangka perlindungan konsumen, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau yang disebut dengan POJK No.01/POJK.07/2013 pada tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam perlindungan konsumen dengan melakukan upaya-upaya menampung aspirasi dari para konsumen dan menyediakan perangkat pengaduan konsumen. Perlindungan ini dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. Secara Preventif yaitu terdiri dari literasi dan edukasi serta inklusi keuangan, pelayanan konsumen, kebijakan perlindungan konsumen dan pemantauan *market conduct*. Tujuannya adalah meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya jika kegiatan tersebut diduga berpotensi merugikan masyarakat atau memberikan peringatan baik secara lisan maupun tertulis, bahkan jika perlu memberikan sanksi administrasi berupa penghentian usaha bank.

²⁷ Erman Radjagukguk, **Peranan Hukum di Indonesia : Menjaga Persatuan, Memulihkan Ekonomi dan Memperluas Sosial**, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2000, Hlm. 35.

- b. Secara Refresif (upaya penindakan) terhadap pelaku usaha dengan menempuh proses hukum, terdiri dari fasilitas penyelesaian pengaduan, tindakan penghentian kegiatan atau tindakan lain dan *alternative dispute resolution* atau pembelaan hukum.²⁸

3. Pengertian Dan Batasan Konsumen Dalam Lembaga Jasa Keuangan

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan kembali.²⁹ Konsumen dalam Undnag-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diartikan secara luas yang artinya Konsumen ini adalah penikmat segala jenis barang dan atau jasa, sedagkan dalam Otoritas Jasa Keuangan memiliki pengertian Konsumen tersendiri

Pengertian Konsumen dalam Otoritas Jasa Keuangan terdapat dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentag Otoritas Jasa Keuangan

“ Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/ atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di lembaga jasa keuangan antara lain nasabah pada perbankan, pemodal di pasar modal, pemegang polis pada perasuransian, dan peserta pada dana

²⁸ Otoritas Jasa Keuangan, **Modul workshop eduksi dan perlindungan konsumen otoritas jasa keuangan**, Jakarta , Departemen Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, 2015, Hlm. 8.

²⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821

pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.”

Dengan berlandaskan pada aspek tujuan Otoritas Jasa Keuangan memberikan batasan pengertian perlindungan konsumen yang dituliskan pada Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 yang menyebutkan :

“ Perlindungan Konsumen dengan cakupan perilaku pelaku usaha jasa keuangan.”

Karena peran dan posisi pelaku usaha jasa keuangan disini dipandang lebih kuat dibandingkan posisi konsumen, maka yang perlu mendapat sorotan lebih adalah pelaku usaha jasa keuangan dalam mengadakan tindakan usahanya.

Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 menyebutkan pengertian dari Pelaku jasa keuangan.

“ Pelaku usaha jasa keuangan adalah bank umum, Bank perkreditan Rakyat, Perusahaan efek, Penasihat Investasi, Bank Kustodian, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Gadai, dan perusahaan penjaminan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah.”

4. Pemahaman Terhadap Perlindungan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan

Kondisi Masyarakat Indonesia berdasarkan Survei Nasional Literasi Keuangan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada

tahun 2013 menunjukkan masih rendahnya pemahaman dan pemanfaatan produk dan/ atau layanan produk jasa keuangan. Dimana hanya 21,84% penduduk indonesia tergolong *well literate* (memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan resiko, hak dan kewajiban terkait produk jasa keuangan). Adapun Indeks Utilitas Produk dan jasa keuangan di indonesia adalah 59,74%. Namun demikian, tingkat literasi dan utilitas keuangan ini tidak merata disetiap sektor jasa keuangan. Seiring dengan itu, pertumbuhan golongan ekonomi menengah pada tahun 2013 tumbuh sebesar 56,7%, jauh meningkat dibanding dengan tahun 2004 sebesar 37%.³⁰

Hal ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat indonesia masih belum memahami dengan baik mengenai manfaat dan resiko produk keuangan serta hak dan kewajiban sebagai sektor jasa keuangan. Bahkan masih terdapat masyarakat yang tidak memahami mengenai Lembaga Jasa Keuangan formal sehingga tidak jarang tergiur dengan penawaran investasi yang berpotensi merugikan masyarakat.

Untuk mencegah terjadinya kondisi seperti itu, Otoritas Jasa Keuangan dan segenap pelaku usaha jasa keuangan berupaya untuk memperluas akses masyarakat ke sektor jasa keuangan yaitu salah satunya dengan cara memperkenalkan perlindungan konsumen kepada masyarakat. Upaya perlindungan konsumen sektor jasa keuangan telah dimulai Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 31 Desember 2012, ketika

³⁰ Otoritas Jasa Keuangan, **Modul workshop edukasi dan perlindungan konsumen otoritas jasa keuangan**, *Op.Cit.*, Hlm. v.

untuk pertama kalinya Otoritas Jasa Keuangan menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan di sektor pasar modal dan industri keuangan non bank.³¹

Perlindungan Konsumen diamanatkan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan. Fungsi perlindungan konsumen yang dirumuskan oleh pembuat Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan tersebut dilatar belakangi kondisi belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan ditengah globalisasi sistem keuangan dan pesatnya kemajuan dibidang teknologi informasi serta inovasi finansial yang menciptakan sistem keuangan yang menciptakan sistem keuangan yang kompleks, dinamis, dan saling terikat antara produk maupun lembaganya. Secara konkrit, permasalahan yang sering timbul misalnya :

- a. Ketidak jelasan konsumen mengenai isi perjanjian / kontrak atas produk keuangan yang dibelinya;
- b. Masih banyak konsumen yang tidak memiliki itikad baik ketika berhubungan dengan pelaku jasa keuangan, misalnya dengan memalsukan identitas, tidak memberikan informasi yang benar, ataupun wanprestasi karena alasan yang tidak jelas.
- c. Mekanisme penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang timpang antar sektor jasa keuangan;
- d. Penawaran–penawaran produk dan jasa keuangan melalui saluran komunikasi pribadi seperti SMS, telpon, dan email.
- e. Penawaran investasi ilegal dengan yang semakin banyak, bahkan memalsukan informasi dan keterangan seakan–seakan kegiatannya legal dan telah dikonfirmasi kepada regulator;

³¹ Kusumaningtuti S. Soetiono, **Sambutan Anggota Dewan Komisiner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen**, Disajikan dalam Seminar Nasional Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Keuangan dalam Sektor Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta, 10 Maret 2015, Hlm. 3.

- f. Adanya permasalahan tindak pidana yang menjadikan bank dan nasabah sebagai sasaaran kejahatannya seperti phissing, carding, pencurian data / informasi nasabah, dll.³²

Dari permasalahan–permasalahan di atas, maka Otoritas Jasa Keuangan mengatur dari sisi regulasi Otoritas Jassa Keuangan dalam peraturan-peraturan dibawah ini :

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan
- b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/ SEOJK.07/ 2014 tentang pelaksanaan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan kepada konsumen dan/atau masyarakat
- c. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor :2/SEOJK.07/ 2014 tentang pelayanan dan penyelesaian pengaduan konsumen pada pelaku usaha jasa keuangan
- d. pertaturan otoritas jasa keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang keberadaan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di sektor jasa keuangan.

Ke empat peraturan di atas adalah dasaran dalam perlindungan konsumen untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada dalam jasa keuangan. Dalam melaksanakan amanat perlindungan kepada konsumen dan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan menerapkan lima prinsip perlindungan konsumen, yaitu :

- a. Transparasi;
- b. Perlakuan yang adil;
- c. Kehandalan;
- d. Kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen; serta

³² Kusumaningtuti S.Soetiono, *Op.Cit.*, Hlm. 2.

- e. Penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat dan dengan biaya yang terjangkau.

Tujuan dari lima prinsip perlindungan konsumen adalah agar pelaku Usaha Jasa Keuangan dapat mengimplementasikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Perlindungan Konsumen berserta seluruh peraturan pelaksanaannya dengan baik.

Di sini yang menjadi ruang lingkup bagi perlindungan konsumen sektor jasa keuangan adalah :

a. Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK)

Pelaku usaha ini biasanya adalah Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Bank Kustodian, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Gadai, dan Perusahaan Penjaminan. Baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah.

b. Direksi

- 1) Bagi pelaku jasa keuangan yang merupakan badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas;
- 2) Bagi pelaku jasa keuangan yang merupakan badan hukum yang berbentuk perusahaan daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perusahaan daerah;

- 3) Bagi pelaku usaha jasa keuangan badan hukum yang berbentuk koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang perkoprasisan
- 4) Bagi pelaku usaha jasa keuangan badan hukum yang berbentuk dana pensiun adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang dana pensiun
- 5) Bagi kantor cabang bank asing adalah pimpinan kantor cabang bank asing.

c. Konsumen

Pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di lembaga jasa keuangan antara lain, nasabah pada perbankan, pemodal di pasar modal, pemegang polis pada perasuransuan dan peserta pada dana pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undang di sektor jasa keuangan.

33

5. Penyelesaian Pengaduan dan penyelesaian sengketa Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan

Untuk menyelesaikan permasalahan pengduan dan penyelesaian sengketa Konsumen terhadap pelaku usahasa jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan surat edaran nomor 2/SEOJK.07/2014 tentang pelayanan dan penyelesaian pengaduan konsumen pada pelaku usaha jasa keuangan.

³³ Otoritas Jasa Keuangan, *Op.Cit.*, Hlm. 26.

Tujuan dari pembuatan dari surat edaran ini adalah untuk mempermudah masyarakat memahami prosedur dari penyelesaian pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen. Dalam surat edaran ini berisi beberapa cara untuk membantu menyelesaikannya yaitu :

- (1) Ketentuan Umum
- (2) Mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan konsumen
- (3) Penyelesaian pengaduan berupa pernyataan maaf atau menawarkan ganti rugi (*redress/remedy*)
- (4) Penyelesaian pengaduan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa (LAPS)
- (5) Pembentukan unit kerja atau penunjukan pejabat yang melakukan fungsi pelayanan dan penyelesaian pengaduan konsumen
- (6) Sumber daya manusia dan pelatihan
- (7) Pelaporan pelayanan dan penyelesaian pengaduan³⁴

C. Tinjauan Umum Mengenai Itikad Tidak Baik

Untuk saat ini itikad tidak baik belum memiliki pengertian yang pasti. Setiap negara memiliki pengertian mengenai itikad tidak baik masing-masing, dan pengertian itu memiliki arti yang berbeda-beda tergantung dengan hukum yang berlaku di setiap negara.

Di Indonesia sendiri, pengaturan mengenai itikad tidak baik saat ini belum di atur secara spesifik. Ada yang menyebutkan itikad tidak baik adalah lawan dari itikad baik yang tertera pada pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan di dukung oleh beberapa pengertian dari Pasal 529 dan pasal 530 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata serta beberapa pasal – pasal pendukung dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

³⁴ Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014 Tentang Pelaksanaan Edukasi Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan Kepada Konsumen Dan/Atau Masyarakat.

Selain di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata istilah “itikad tidak baik” ada dalam beberapa Undang – Undang Misalnya dalam Undang-Undang No. 15 tahun 2001 Tentang Merek dan hanya mengatur mengenai syarat dari pendaftaran merek yang berlandaskan dari kebalikan itikad baik, kemudian ada juga pengertian istilah itikad tidak baik (beritikad buruk) dari Hukum Asuransi yang menjelaskan juga bahwa itikad tidak baik adalah kebalikan dari itikad baik yang berladaskan menurut pasal 1338 Kitab Undang – Undang Hukum Pederata dan terakhir adalah dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Mengenai Otoritas Jasa Keuangan, yang menggunakan istilah “itikad tidak baik” dalam pasal 30 ayat 1 butir b. Otoritas Jasa Keuangan memiliki pengertian tersendiri mengenai istilah “itikad tidak baik” tersebut. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (secara sederhana) istilah “itikad tidak baik” adalah pihak yang menyebabkan kerugian.

Untuk menyederhanakan beberapa hal di atas, maka dapat di tarik kesimpulan bahwa istilah itikad tidak baik muncul karena beberapa hal, yaitu :

1. Pelanggaran perjanjian yang telah dibuat
2. Tidak kecakapan hukum dalam perjanjian
3. Menimbulkan kerugian
4. Pelanggarann asas itikad baik

Kempat hal tersebut merupakan kesimpulan sederhana yang berhubungan dengan istilah “ itikad tidak baik ” dan untuk penafsiranya harus di ingat tergantung dari hukum mana yang berlaku dan bagaimana cara penyelesaiannya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penulisan ini adalah penelitian Yuridis Normatif. Penelitian Yuridis Normatif adalah suatu metode penelitian yang lebih memfokuskan mengkaji mengenai penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹ Penelitian ini mencoba untuk menganalisis permasalahan berdasarkan pada teori-teori hukum pendapat-pendapat para sarjana hukum dan Undang-Undang yang terkait dengan itikad tidak baik terkait pihak yang menyebabkan kerugian terutama pada otoritas jasa keuangan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan yuridis Normatif dan penulisan ini memakai metode:

a. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

Pendekatan pertama yang dipergunakan dalam penulisan ini menggunakan *statute approach* berawal dari pandangan dan Doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Metode *statute approach* ini menjelaskan mengenai semua Undang-Undang dan regulasi bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.²

Peneliti menemukan permasalahan yang terdapat dalam pasal 30

¹ Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia Publishing, Surabaya, 2007, Hlm. 295.

² Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana-Prenada Media Grup, Jakarta, 2005, Hlm. 93.

ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan mengenai istilah itikad tidak baik.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Adapun jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penulisan ini antara lain:

- a) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perjanjian
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- d) Beberapa yang berkaitan dengan Otoritas Jasa Keuangan , regulasi edukasi dan perlindungan seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edarannya.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan atau bersifat menunjang terhadap bahan hukum primer dan data-data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.³ Bahan hukum yang diperoleh untuk melengkapi data pokok :

- a. Buku Literatur
- b. Buku -buku ilmiah
- c. Jurnal dan Penelusuran situs yang terdapat di internet.

³ Peter Mahmud Marzuki , Op.Cit., Hlm. 141.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan arahan serta kejelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁴

D. Teknik Memperoleh Bahan Hukum

Teknik memperoleh bahan hukum peneliti mengumpulkan bahan hukum dengan melakukan studi kepustakaan (*Library Research*) karena menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), dan pendekatan analisis (*analytical approach*). Bahan Hukum diperoleh dari mempelajari satu bahan hukum yang dilanjutkan dengan melihat daftar pustaka atau refrensi yang terdapat dalam beberapa bahan hukum tersebut. Kemudian diolah kembali untuk menjadikan bahan hukum tersebut untuk menjadi acuan dalam menganalisa permasalahan.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Mendeskripsikan prosedur, cara dan teknik pengelolaan bahan hukum dan analisis bahan hukum. Jenis penelitian normatif dapat menggunakan teknik analisis melalui interpretasi atau penafsiran terhadap semua bahan hukum yang telah dikumpulkan.

⁴ Peter Mahmud Marzuki , *Op.Cit.*, Hlm. 296.

F. Definisi Konseptual

- a. Itikad tidak baik adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang menyebabkan kerugian bagi para pihak yang lain yang muncul dari pelanggaran itikad baik.
- b. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.
- c. Konsumen menurut Otoritas Jasa Keuangan adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/ atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di lembaga jasa keuangan antara lain nasabah pada perbankan, pemodal di pasar modal, pemegang polis pada perasuransian, dan peserta pada dana pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan
- d. Pihak yang menyebabkan kerugian adalah para pihak yang telah melanggar isi perjanjian yang telah mereka sepakati dan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihaknya.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Penafsiran itikad tidak baik terkait pihak yang menyebabkan kerugian menurut Otoritas Jasa Keuangan

Seperti yang kita ketahui Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain. Mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan di sektor jasa keuangan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Sesuai dengan amanah Pasal 34 Undang-Undang No 23 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 Tentang Bank Indonesia telah lahir sebuah Undang-Undang Nomor. 21 tahun 2011 Tentang Lembaga Otoritas Jasa Keuangan. Undang-Undang tersebut diberlakukan mulai 1 Januari 2013. Lembaga Independen tersebut ditugaskan untuk mengatur dan mengawasi Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank, yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan Non-Bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Bursa Efek / Pasar Modal, Modal Ventura, Perusahaan Anjak Piutang, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi.

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan bertujuan agar kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel. Harapan terbentuknya Lembaga Otoritas Jasa Keuangan adalah mampu melindungi sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Sejarah Singkat Otoritas jasa Keuangan terlaksana pada tanggal 31 Desember 2012, dilaksanakannya pergantian kewenangan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan-Kementrian Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan mulai dari fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih. Setahun kemudian pada tanggal 31 Desember 2013 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan.¹

Adanya peralihan kewenangan maka Otoritas Jasa Keuangan mulai menjalankan tugasnya. Sejak republik ini berdiri baru pertama kalinya lahir sebuah Lembaga Otoritas Jasa Keuangan yang mengawasi Lembaga Keuangan secara terintegrasi yaitu lembaga keuangan bank dan non-bank. Lembaga independen tersebut akan mengambil alih tugas pengawasan lembaga keuangan bank dan non-bank yang selama ini dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai pengawas Bank dan Bapepam-LK untuk lembaga keuangan bukan bank sebagaimana disebutkan di atas.

Seperti yang dijelaskan di atas, Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki fungsi sistem pengaturan dan pengawasan yang terintergrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam Sektor Jasa Keuangan yaitu :

1. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan
2. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal

¹ Otoritas Jasa Keuangan, **Booklet Perbankan Indonesia**, Jakarta , Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan Otoritas Jasa Keuangan, Edisi 1, maret 2014, ISSN : 1858 -4233, 2014, Hlm. 19.

3. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

Dengan adanya Fungsi sistem pengaturan dan pengawasan di atas membuat fokus Otoritas Jasa Keuangan menjadi terarah. Dari beberapa Sektor Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan juga tak luput dalam pengaturan dan pengawasan terhadap Konsumen Jasa Keuangan. Konsumen Jasa Keuangan merupakan komponen penting dalam berlangsungnya Sektor Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan saat ini memiliki sebuah bidang baru, yaitu Edukasi dan Perlindungan Konsumen, bertujuan untuk meminimalisir terjadinya sengketa antara pelaku jasa keuangan dengan nasabah atau konsumen Sektor Jasa Keuangan. Faktor utama dikembangkannya produk ini adalah minimnya pengetahuan masyarakat terhadap Perlindungan Konsumen Perbankan membuat Otoritas Jasa Keuangan sadar akan pentingnya hal tersebut dan mulai mengeluarkan produk baru mengenai Edukasi dan Perlindungan Konsumen.

Pengeluaran Produk Hukum tersebut berdasarkan Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa :

“c. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat”

Inti dari pasal tersebut adalah Otoritas Jasa Keuangan harus memberikan perlindungan kepada konsumen dan/ atau masyarakat.

Selain Pasal 4, hal ini didukung juga dengan adanya Pasal 28 hingga Pasal 31 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yang termuat dalam Bab VI mengenai “ Perlindungan konsumen dan Masyarakat ”.

Fungsi dari perlindungan konsumen yang terdapat dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan tersebut dilatarbelakangi oleh keadaan yang menampilkan belum optimalnya penerapan perlindungan konsumen jasa keuangan ditengah globalisasi sitem keuangan dan pesatnya kemajuan dibidang teknologi informasi serta inovasi finansial yang menciptakan sistem keuangan yang kompleks, dinamis, dan saling terkait antara produk maupun lembaganya.

Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan perlindungan konsumen juga berdasarkan pada Undang – Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen untuk menciptakan perlindungan yang lebih baik lagi terutama pada konsumen di sektor jasa keuangan. Namun tidak semua konsumen itu wajib di lindungi hak – haknya. Ada beberapa Konsumen yang tidak layak untuk di lindungi haknya. Otoritas Jasa Keuangan juga telah mengantisipasi untuk mengatasi dan menindak lanjuti Konsumen yang tidak layak tersebut dalam lingkup sektor jasa keuangan.

Maksud dari konsumen yang tidak layak adalah konsumen yang telah menyebabkan kerugian bagi para pihaknya. Bisa berupa kerugian material atau non material. Tergantung pada awal perjanjian yang telah di sepakati oleh para pihaknya. Oleh sebab itu seperti yang di jelaskan tadi, Otoritas Jasa Keuangan membuat produk yang berkaitan dengan hal tersebut.

Berbicara mengenai pihak yang menyebabkan kerugian dalam Lingkup perlindungan konsumen dan Otoritas Jasa Keuangan berarti ada hubungannya dengan istilah “itikad tidak baik”. Seperti yang di jelaskan di atas istilah “itikad tidak baik” belakangan muncul dalam beberapa Undang-Undang salah satunya muncul dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yang berbunyi :

“Pasal 30

- (1) Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pembelaan hukum, yang meliputi:
 - a. Memberikan perintah atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan Konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud;
 - b. Mengajukan gugatan:
 1. Untuk mendapatkan kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang telah menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang telah menyebabkan kerugian maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik; dan/atau
 2. Untuk mendapatkan ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
- (2) Ganti kerugian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b angka 2 hanya digunakan untuk pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan."

Istilah kata “ itikad tidak baik” sering kita jumpai dalam bahasa hukum akhir – akhir ini.Seperti yang dijelaskan, istilah tersebut sering muncul dalam beberapa undang – undang di antaranya dalam Kitab Hukum Perdata (itu dasarnya), kemudian berkembang luas ke dalam beberapa Undang – Undang antara lain Undang – Undang Merek, Undang – Undang Asuransi dan yang terakhir dalam Undang – Undang Otoritas Jasa Keuangan.

Maraknya penggunaan istilah tersebut membuat perdebatan penafsiran mengenai arti yang sebenarnya dari istilah “itikad tidak baik” itu sendiri. Sebenarnya tidak ada penafsiran secara pasti mengenai “itikad tidak baik”. Beberapa ahli menjelaskan secara sederhana bahwa “itikad tidak baik” akan muncul dari pelanggaran yang terjadi dari perikatan yang bepedoman dengan “itikad baik”. Nah apakah pengertian dari “itikad baik” itu sendiri ?.

Kata – kata “itikad baik” pertama kali muncul di Indonesia dalam Hukum Perdata, yaitu pada Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Istilah tersebut kemudian menjadi Populer di Indonesia dan kemudian istilah tersebut mendapat perhatian khusus dalam hukum keperdataan. Penyebab populernya istilah tersebut terdapat dalam pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata mengenai akibat dari suatu perjanjian.

Perkembangan hukum perjanjian di Indonesia inilah yang menyebabkan istilah tersebut mempengaruhi dan menjadi acuan hukum yang ada di Indonesia. Tidak hanya hukum Perdata namun juga ikut mempengaruhi hukum yang lainnya yang saling berkaitan. Efek dari istilah tersebut adalah beberapa Undang – Undang yang lain ikut untuk mengadopsi kata-kata tersebut menjadi acuan dalam pembentukan Undang – Undang yang mereka punya sebagai landasan mengenai “itikad baik” dan jika ada pertanyaan mengenai penafsiran “itikad baik” akan megacu kembali pada Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Padahal Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang – Undang Hukum perdata tidak menjelaskan secara konkrit mengenai arti dari “itikad baik” itu sendiri.

Walaupun tidak dijelaskan secara pasti dalam pasal 1338 ayat (3) Kitab Hukum Perdata namun jangan sampai rancu mengenai penafsiran istilah “itikad baik”. Ada beberapa ketentuan hukum dalam Kitab Undang – Undang Perdata yang mendukung dalam penafsiran mengenai “itikad baik” dan yang mengaturnya terdapat dalam pasal-pasal berikut:

1. Pasal 530 – 533 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dalam pasal 530 hingga 533 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan mengenai tentang kedudukan penguasaan kebendaan yang terbagi menjadi dua yaitu itikad baik dan itikad buruk (itikad tidak baik) dan menjelaskan bagaimana posisi kedudukan itikad baik dan itikad tidak baik dalam penguasaan kebendaan. Masuk dalam katagori Buku Kedua Tentang Kebendaan²

2. Pasal 548 dan Pasal 549 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 548 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata menjelaskan mengenai hak-hak atas kebendaan yang dikuasai dari beritikad baik dan Pasal 549 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata lebih menekankan kepada pihak yang beritikad buruk akibat dari penguasaan kebendaan. Masuk dalam katagori Buku Kedua Tentang Kebendaan.³

² Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12

³ Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12

3. Pasal 575 – 579 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dalam pasal-pasal ini menjelaskan tentang penguasaan hak milik (EIGENDOM) yang beritikad baik dan beritikad buruk. Lebih menekankan bagaimana pemberian hak kepada pihak yang beritikad baik dan memberikan kosekuensi terhadap pihak yang beritikad buruk (itikad tidak baik);⁴

4. Pasal 1965 an Pasal 1966 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kedua pasal ini menegaskan bahwa Itikad baik itu selamanya harus dianggap ada sedangkan jika merujuk pada itikad tidak baik wajib untuk membuktikannya.⁵

Penjelasan diatas membantu paham mengenai pengertian dari “itikad baik” dan secara tidak langsung menimbulkan pemahaman mengenai “itikad tidak baik” secara tidak langsung.

Secara sederhana dari penjelasan diatas penafsiran dari “ itikad baik” adalah sebuah perbuatan hukum yang di lakukan berlandaskan niatan baik (kejujuran) dalam melakukan perbuatan hukum dan sesuai dengan norma kepatuhan atau sesuatu hal yang dirasa sesuai dengan norma dalam masyarakat yang tidak menimbulkan merugikan untuk para pihak.

Untuk mempertegas dan memperjelas penafsiran sederhana “ itikad baik” Dalam lokarya hukum perikatan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Departemen Kehakiman dari tanggal

⁴ Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12

⁵ Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12

17-19 desember 1985 Asas itikad baik terjabarkan dalam delapan asas pendukung membentuk asas itikad baik yaitu⁶:

1. Asas Kepercayaan. Maksudnya adalah kepercayaan dari para pihak yang akan memenuhi setiap prestasi di kemudian hari
2. Asas Persamaan Hukum. Maksudnya adalah Subyek hukum yang mengadakan perjanjian tersebut memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama.
3. Asas Keseimbangan. Maksudnya adalah mereka memiliki hak dan kewajiban yang harus sama-sama mereka taati
4. Asas Kepastian Hukum. Maksudnya adalah kepastian ini adalah kekuatan mengikatnya sebuah perjanjian, yaitu undang-undang yang membuatnya.
5. Asas Moral. Asas ini terikat dengan perikatan yang wajar, yaitu suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak dapat menuntut hak baginya untuk menggugat prestasi dari pihak debitur
6. Asas Kepatutan. Asas ini tertuang dalam pasal 1339 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berkaitan dengan isi perjanjian.
7. Asas Kebiasaan. Asas merupakan salah satu bagian dalam perjanjian yang dilihat dari kebiasaan perjanjian lazim diikuti
8. Asas Perlindungan. Para pihak harus di lindungi oleh hukum.

⁶ Salim H.S., **Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak**, sinar grafika, Cetakan ke 4, Jakarta, 2006, Hlm. 13.

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) telah mempertegas tentang keberadaan “itikad baik” yang merupakan faktor pendukung utama di setiap asas hukum. Tanpa adanya “itikad baik” maka tidak akan sempurna.

Dengan adanya istilah “itikad baik” lambat laun munculah istilah “itikad tidak baik”. Pada dasarnya terciptanya kata “itikad tidak baik” berkaitan dengan prinsip dari “itikad baik” yang merupakan faktor utama dalam mempengaruhi pengertian dari itikad tidak baik. Penafsiran secara sederhananya, timbul istilah itikad tidak baik akan terjadi jika telah terjadi pelanggaran dari itikad baik dan menimbulkan suatu akibat yaitu sebuah kerugian.

Dari pemikiran yang sederhana tersebut munculah beberapa penafsiran yang lebih spesifik mengenai istilah “ itikad tidak baik”. Dalam penggunaan istilah “ itikad tidak baik ” beberapa Undang – Undang memiliki penafsiran tersendiri, namun tidak terlepas dari dasar pengertian itikad tidak baik yang tertera pada Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

Untuk memperjelasnya, secara garis besar Setiap perbuatan yang bertentangan dengan itikad baik dapat diindikasikan sebagai bentuk itikad tidak baik. Seperti yang dijelaskan di atas, hingga saat ini belum ada ketentuan yang menafsirkan mengenai itikad tidak baik. Itikad tidak baik itu sendiri bisa ditafsirkan tergantung dari permasalahan atau kasus yang dihadapi.

Seperti di jelaskan di atas, istilah “itikad tidak baik” dalam undang-undang otoritas jasa keuangan muncul pada pasal 30 ayat 1 huruf b pengertian mengenai istilah itikad tidak baik tidak di jelaskan secara

gambalang dalam Undang – Undangnya. Penjelasan pada Pasal 30 ayat 1 huruf b hanya menjelaskan bahwa :

“ Yang dimaksud dengan ‘itikad tidak baik’ adalah itikad tidak baik berdasarkan pengertian dari Otoritas Jasa Keuangan”.

Berarti Otoritas Jasa Keuangan memiliki penafsiran tersendiri mengenai itikad tidak baik. Otoritas Jasa Keuangan menanggapi istilah “ itikad tidak baik” nampaknya lebih merujuk pada “pihak terkait” yang menyebabkan kerugian.

Kata “Pihak” disini menurut Otoritas Jasa Keuangan adalah para pelaku jasa keuangan baik yang merupakan Lembaga Jasa Keuangan maupun Konsumen yang pengertiannya terdapat dalam pasal 1 angka 10 dan angka 15 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan⁷. Para pihak baik lembaga jasa keuangan maupun konsumen harus memiliki itikad baik dalam pelaksanaannya. Maka Otoritas Jasa Keuangan merupakan pengawas dan penengah jika di kemudian hari terjadi permasalahan.

Mengenai penafsiran Otoritas Jasa Keuangan itikad tidak baik terkait pihak yang menyebabkan kerugian sebenarnya tidak dapat dijelaskan secara pasti sehingga dalam penerapannya mengenai itikad tidak baik hanya sesuai dengan kondisi atau permasalahan yang terjadi dalam lalu lintas jasa keuangan dan dengan kewenangan yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan harus segera mungkin menindak lanjuti.

⁷ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5253

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa “para pihak” merupakan unsur penting dalam keterkaitannya dengan pengertian itikad tidak baik. Mengapa disebut penting ? Alasan Pertama, para pihak merupakan salah satu unsur dalam pembuatan perjanjian. Tanpa adanya para pihak maka perjanjian tersebut tidak dapat terlaksana dan jika tidak ada perjanjian maka tidak terjadi permasalahan apalagi mengenai itikad tidak baik. Kedua, dalam sektor jasa keuangan “para pihak” merupakan partisipan yang membuat berkembangnya sektor jasa keuangan baik buruk ataupun baik.

Setelah pengertian “para pihak” secara luas dan sederhana sekarang akan diperjelas dengan “pihak terkait yang menyebabkan kerugian” menurut Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan memiliki pengertian sendiri terhadap pihak terkait yang menyebabkan kerugian. Seperti yang kita tahu Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan dalam sektor jasa keuangan yang terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan juga memiliki kewenangan untuk melakukan :

- 1) pengawasan,
- 2) pemeriksaan,
- 3) penyidikan,
- 4) perlindungan konsumen, dan
- 5) tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan

Pasal 6 Undang – Undang Otoritas Jasa Keuangan menjadi acuan awal Otoritas Jasa Keuangan untuk membuat acuan tersendiri terkait penafsiran mengenai “ itikad tidak baik terkait pihak yang menyebabkan kerugian”. Tidak terlalu melenceng dari acuan –acuan mengenai itikad tidak baik yang

lainnya. Otoritas Jasa Keuangan memiliki beberapa hal yang menjadi sebuah acuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menetapkan suatu tindakan dilakukan dengan itikad baik atau tidak baik antara lain :

- a. Ada fakta kesengajaan
- b. Ada fakta keuntungan yang di peroleh pelaku atau pihak lain yang terkait pelaku
- c. Ada fakta pelanggaran perundang – undangan
- d. Adanya pengulangan perbuatan
- e. Adanya pembiaran / omissions
- f. Adanya cacat yang di sembunyikan / disamarkan.⁸

Acuan diatas merupakan awal untuk membantu mempertegas batasannya dalam lingkup Otoritas Jasa Keuangan dalam menyikapi pemahaman mengenai penafsiran “ itikad tidak baik terkait pihak yang menyebabkan kerugian ” menurut Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam Otoritas Jasa Keuangan yang berwenang untuk menyatakan itikad baik atau tidak baik adalah satuan kerja yang diberi kewenangan dalam Peraturan Dewan Komisaris yaitu Satuan kerja Edukasi dan Perlindungan Konsumen, khususnya yang melaksanakan tugas gugatan untuk kepentingan konsumen punya kewenangan, kemudian argumen Otoritas Jasa Keuangan tersebut akan diuji oleh Hakim. Setelah diuji oleh hakim maka Otoritas Jasa Keuangan dapat memutuskan bahawa tindakan yang di lakukan oleh para pihak tersebut merupakan itikad tidak baik.⁹

⁸ Suyuti, **Dasar Penetapan Itikad Tidak Baik Menurut Otoritas Jasa Keuangan**, Otoritas Jasa Keuangan (wawancara), tanggal 3 desember 2015

⁹ Ibid

Untuk mengantisipasi permasalahan mengenai itikad tidak baik terkait para pihak yang menyebabkan kerugian, Otoritas Jasa Keuangan membuat beberapa peraturan yang membantu untuk memperjelas pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan. Peraturan yang telah di baut oleh Otoritas Jasa Keuangan antara lain :

1. Salinan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/SEOJK.07/2014 tentang pelaksanaan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan kepada konsumen dan/atau masyarakat
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 2/SEOJK.07/2014 tentang pelayanan dan penyelesaian pengaduan konsumen pada pelaku usaha jasa keuangan
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 12/SEOJK.07/2014 tentang penyampaian informasi dalam rangka pemasaran produk dan/atau layanan jasa keuangan.
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 13/SEOJK.07/2014 tentang perjanjian baku
6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 14/SEOJK.07/2014 tentang kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen
7. Ditambah beberapa boklet pendamping yang di keluarkan setiap satu tahun sekali sebagai pendamping.

Peraturan – peraturan di atas adalah pendukung untuk mewujudkan tujuan bersama yaitu adalah untuk menerepakan prinsip keseimbangan antara menumbuh kembangkan sektor jasa keuangan secara berkesinambungan dan secara bersamaan, memberikan perlindungan kepada konsumen dan/atau masyarakat sebagai pengguna jasa keuangan.

Pembahasan di atas menjelaskan mengenai Produk hukum yang di buat oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk perlindungan konsumen terhadap “itikad tidak baik” terkait pihak yang menyebabkan kerugian. Dengan adanya Produk hukum yang telah di buat oleh Otoritas Jasa Keuangan bertujuan untuk meminimaliskan akibat hukum dari “ itikad tidak baik”.

Ada beberapa akibat hukum yang ditimbulkan dari itikad tidak baik dalam hukum perdata. Akibat hukum yang disebabkan dari itikad tidak baik tersebut sama halnya dengan akibat hukum dari sebuah perjanjian. Mengapa demikian ? Itikad tidak baik itu terjadi karena adanya pelanggaran dari sebuah kesepakatan atau perjanjian. Ada empat macam akibat hukum dari pelaksanaan perjanjian yaitu :

1. Wanprestasi

Wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian. Seorang debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak yang dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi ada empat macam wujudnya, yaitu :

- a. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
- b. Melaksanakan prestasi, tetapi tidak sebagaimana mestinya;
- c. Melaksanakan prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya;
- d. Melaksanakan perbuatan yang dilarang dalam kontrak.¹⁰

2. Sanksi

Sanksi adalah suatu tindakan pemberian hukuman jika telah terjadi pelanggaran dalam perjanjian yang telah dibuat

¹⁰ Muhamad Syaifudin, **Hukum Kontrak**, Mandar Maju, Bandung, 2012, Hlm. 338.

3. Ganti Kerugian

Ganti kerugian adalah suatu akibat yang dilakukan oleh salah satu pihak dikarenakan telah menyebabkan kerugian kepada pihak yang lain.

4. Keadaan Memaksa

Keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya sebuah perjanjian, yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, dimana debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung resiko serta tidak dapat meduga pada waktu persetujuan dibuat. Keadaan memaksa dapat bersifat tetap dan sementara.

Ke-empat akibat hukum di atas adalah akibat hukum secara hukum umum, ada satu lagi akibat hukum menurut Otoritas Jasa Keuangan yaitu Perbuatan Melawan Hukum. Dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Perbuatan Melawan Hukum hanya diartikan dalam arti sempit yaitu sebagai perbuatan yang telah melanggar Undang-Undang, namun dengan seiring perkembangan zaman arti Perbuatan Melawan Hukum telah berkembang. Menurut Hoge Raad seorang ahli hukum mendefinisikan Perbuatan Melawan Hukum tidak hanya melanggar Undang-Undang saja, tetapi perbuatan yang melanggar kepatutan, kehati-hatian, dan kesusilaan dalam hubungan antara sesama warga masyarakat dan terhadap benda orang lain.¹¹

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Perbuatan Melawan Hukum termasuk dalam kategori dari itikad tidak baik menurut kategori

¹¹ Suharnoko, **Hukum perjanjian: Teori dan Analisa Kasus**, kencana, Jakarta, 2004, Hlm. 121.

Otoritas Jasa Keuangan, dari unsur-unsur yang telah dijelaskan di atas pada intinya perbuatan yang dilakukan oleh Bank Mega telah melanggar :

1. Melanggar hak subyektif orang lain (hak yang ditentukan Undang-Undang)
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku (kewajiban yang ditentukan Undang-Undang); atau
3. Bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

Adanya unsur-unsur dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menetapkan suatu perbuatan tersebut merupakan itikad baik atau itikad tidak baik sehingga dapat diklarifikasikan bahwa itikad tidak baik yang dimaksud oleh Otoritas Jasa Keuangan lebih mengarah kepada Perbuatan Melawan Hukum yang telah menyebabkan kerugian bagi para pihaknya.

akibat hukum di atas di timbulkan dari “itikad tidak baik” dalam kesepakatan atau perjanjian yang telah dibuat oleh para pihaknya. Jika ada akibat hukum maka ada penanganannya. Hal tersebut selalu berlaku, sebenarnya tidak hanya pada hal ini tapi pada semua hal. Secara sederhana setiap tindakan yang di perbuat pasti akan berdampak pada sebab – akibat – penanganan yang selalu terhubung satu sama lainnya.

Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan beberapa produk hukum terhadap perlindungan konsumen. Produk – produk hukum tersebut telah dijelaskan di atas dan sudah mulai dilakukannya Edukasi mengenai Perlindungan Konsumen oleh Otoritas Jasa Keuangan. Di bawah ini adalah

contoh gambar alur siklus edukasi yang di buat oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam Modul Perlindungan Konsumen yang diedarkan oleh mereka.¹²



Gambar 1. Siklus Edukasi

Edukasi bertujuan untuk menginformasikan fitur dasar produk dan/atau layanan jasa keuangan, manfaat, biaya, risiko, hak, dan kewajiban dengan tujuan memberikan keyakinan, pengetahuan, dan keterampilan Konsumen dan/atau masyarakat agar dapat menentukan produk dan/atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan.

Masyarakat saat ini bisa sangat mudah untuk mengakses mengenai Sektor Jasa Keuangan dengan bantuan dari Otoritas Jasa Keuangan yang mempermudah pemahaman mengenai hal tersebut. Selain mempermudah pemahaman mengenai Sektor Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan juga mempermudah untuk masalah Pengaduan dan pelaporan terkait Sektor Jasa Keuangan. Untuk masalah pelaporan Pelaku Usaha Jasa Keuangan menyampaikan Laporan Pengaduan Nasabah dengan periode waktu pelaporan adalah triwulanan secara offline ke OJK, namun demikian khusus untuk Pelaku Usaha Jasa Keuangan sektor Perbankan, selain secara offline wajib menyampaikan

¹² Otoritas Jasa Keuangan, **Modul workshop eduksi dan perlindungan konsumen otoritas jasa keuangan** *Op.Ci.*, Hlm. 11.

secara online melalui Sistem Laporan Kantor Pusat Bank Umum – Bank Indonesia dan dalam internal Perusahaan, sebaiknya laporan pengaduan Konsumen oleh unit kerja yang membidangi disampaikan secara rutin kepada Pimpinan sebagai masukan dalam perumusan kebijakan Perusahaan.

Dibawah ini adalah beberapa cara untuk melakukan pelaporan dan pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan.¹³



Gambar 2. Macam-macam cara Pelaporan dan Pengaduan

Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam perlindungan konsumen dengan melakukan upaya-upaya menampung aspirasi dari para konsumen dan menyediakan perangkat pengaduan konsumen. Perlindungan ini dilakukan dengan dua cara yaitu:

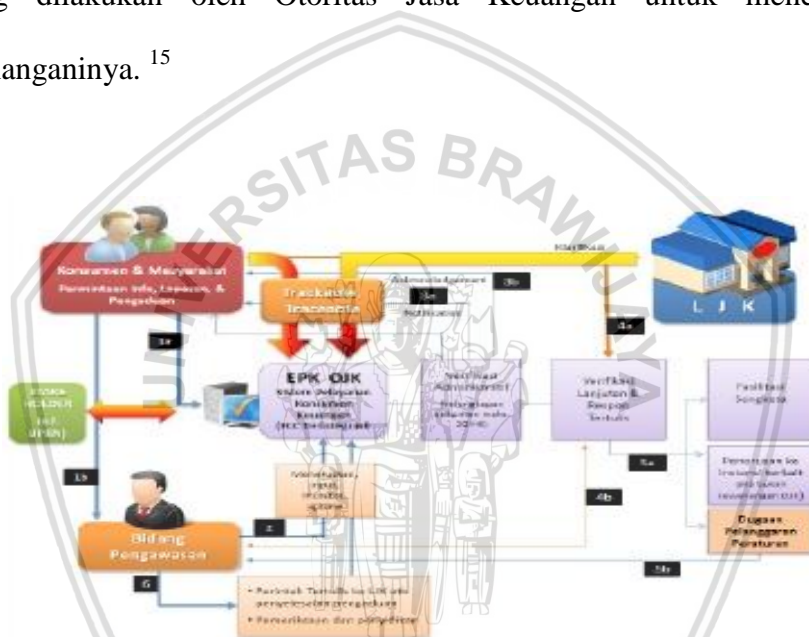
- a. Secara Preventif yaitu terdiri dari literasi dan edukasi serta inklusi keuangan, pelayanan konsumen, kebijakan perlindungan konsumen dan pemantauan *market conduct*. Tujuannya adalah meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya jika kegiatan tersebut diduga berpotensi merugikan masyarakat atau memberikan peringatan baik secara lisan maupun tertulis, bahkan

¹³ Otoritas Jasa Keuangan, **Modul workshop edukasi dan perlindungan konsumen otoritas jasa keuangan** *Op.Cit.*, Hlm. 43.

jika perlu memberikan sanksi administrasi berupa penghentian usaha bank.

- b. Secara Refresif (upaya penindakan) terhadap pelaku usaha dengan menempuh proses hukum, terdiri dari fasilitas penyelesaian pengaduan, tindakan penghentian kegiatan atau tindakan lain dan *alternative dispute resolution* atau pembelaan hukum.¹⁴

Setelah proses pelaporan dan pengaduan, ini adalah alur penanganan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menerima dan menanganinya.¹⁵



Gambar 3. Mekanisme Penerimaan dan Penanganan Pengaduan di Otoritas Jasa Keuangan

Setelah penerimaan dan penanganan pengaduan Otoritas Jasa Keuangan akan memberikan tanggapan dan menindaklanjuti dengan segera jika benar telah terjadi pelanggaran. Hal tersebut menjadi mempermudah Konsumen untuk menangani permasalahan dalam sektor jasa keuangan.

¹⁴ Otoritas Jasa Keuangan, **Modul workshop edukasi dan perlindungan konsumen otoritas jasa keuangan** *Op.Cit.*, Hlm. 15.

¹⁵ Otoritas Jasa Keuangan, **Modul workshop edukasi dan perlindungan konsumen otoritas jasa keuangan** *Op.Cit.*, Hlm. 48.

Ada beberapa contoh kasus yang sering diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan dan hampir seluruhnya adalah Itikad tidak baik terkait Pihak yang menyebabkan kerugian. Misalnya dalam Perbankan :

1. Transparansi informasi atas hak, kewajiban, bunga, biaya dan denda dalam hal tidak disampaikannya perjanjian kredit/polis asuransi oleh Bank (*Bancassurance*).
2. Permintaan restrukturisasi kredit oleh debitur
3. Keberatab konsumen atas lelang jaminan karena tunggakan kredit
4. Penggunaan kartu kredit oleh orang lain karena kelalaian pihak bank
5. Penggelapan dana oleh petugas bank
6. Penggunaan identitas orang lain¹⁶

Sebenarnya tidak hanya dalam perbankan saja contoh kasusnya, bisa terjadi pada peransuriansan, Lembaga pembiayaan, Pensiunana dan masih banyak lagi produk yang dikeluarkan oleh Sektor Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan sendiri berusaha untuk meminimaliskan dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada Sektor Jasa Keuangan.

Dengan adanya Edukasi Perlindungan Konsumen yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, masyarakat bisa merasa aman dan paham mengenai perlindungan konsumen dalam sektor jasa keuangan untuk mengurangi stigma negatif dalam sektor jasa keuangan serta meminimaliskan terjadinya itikad tidak baik terkait pihak yang menyebabkan kerugian.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami mengenai penafsiran Itikad tidak baik terkait pihak yang menyebabkan kerugian, secara sederhana penafsiran Itikad tidak baik tersebut muncul dari sebuah perbuatan yang melanggar

¹⁶ Otoritas Jasa Keuangan, **Modul workshop edukasi dan perlindungan konsumen otoritas jasa keuangan** *Op.Cit.*, Hlm. 51.

norma-norma dari sebuah perjanjian atau kesepakatan yang di buat oleh para pihaknya yang bersinggungan dengan itikad baik. Istilah Itikad tidak baik akan timbul apabila telah terjadi sebuah pelanggaran dari itikad baik dan menimbulkan suatu akibat, yaitu sebuah kerugian. Kerugian yang dimaksud adalah kerugian material dan non material.

Setiap Undang-Undang yang menyebutkan kata “itikad tidak baik” memiliki pengertian atau penafsiran yang berbeda-beda, namun tidak terlepas dari pengaruh penafsiran “itikad baik” menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan menurut para ahli hukum.

Maksud penafsiran yang berbeda-beda di sini adalah penafsiran secara spesifik atau lebih menitik beratkan pada sesuatu hal, misalnya objek atau subyeknya dalam permasalahan tersebut. Namun tetap harus diingat penafsiran tersebut tidak melenceng dengan penafsiran awal mengenai itikad tidak baik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Otoritas Jasa Keuangan lebih menitik beratkan penafsiran itikad tidak baik kepada perbuatan yang dilakukan oleh para pihaknya. Perbuatan para pihak yang melanggar aturan dalam sebuah perjanjian yang dibuat yang dianggap sebagai itikad tidak baik. Intinya setiap perbuatan yang dilakukan oleh salah satu atau beberapa pihaknya yang menyebabkan kerugian bagi para pihak lainnya itulah yang disebut dengan Itikad tidak baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang sudah dituliskan dalam Bab pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Penafsiran itikad tidak baik adalah sebuah tindakan yang sejak awal telah di rencanakan atau tidak direncanakan sama sekali, tujuan dilakukan di lakukannya tindakan tersebut untuk dapat merugikan para pihaknya
2. Otoritas Jasa Keuangan lebih menekankan penafsiran itikad tidak baik adalah kepada para “ Pihak”. Para Pihak adalah pelaku dalam sektor jasa Keuangan dan otomatis mereka memiliki peranan yang besar.
3. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan suatu tindakan itikad tidak baik terkait pihak yang menyebabkan kerugian antara lain :
 - a. Ada fakta kesengajaan
 - b. Ada fakta keuntungan yang diperoleh pelaku atau pihak lain yang terkait pelaku
 - c. Ada fakta pelanggaran perundang-undangan
 - d. Adanya pengulangan perbuatan
 - e. Adanya pembiaran / omissions
 - f. Adanya cacat yang di sembunyikan / disamarkan.
4. Ada empat macam akibat hukum dari pelaksanaan perjanjian yang terjadi akibat dari itikad tidak baik yaitu :
 - a. Wanprestasi
 - b. Sanksi
 - c. Ganti Kerugian
 - d. Keadaan Memaksa

5. Otoritas Jasa Keuangan membuat produk hukum perlindungan konsumen untuk melindungi para pihaknya dari itikad tidak baik terkait pihak yang menyebabkan kerugian. Otoritas Jasa Keuangan menjadi penengah antara para pelaku jasa keuangan di sektor jasa keuangan.

B. Saran

Melihat kesimpulan di atas penulis ingin memberikan saran terkait dengan itikad tidak baik yang harus dipertegas penafsirannya dan penerapannya dalam lingkup Otoritas Jasa Keuangan agar masyarakat tidak rancu dalam menafsirkan itikad tidak baik terkait dengan pihak yang menyebabkan kerugian.

Penafsiran itikad tidak baik dalam Otoritas Jasa Keuangan berpedoman pada Pasal 30 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas jasa keuangan yang kemudian di kembangkan dengan adanya beberapa produk hukum yang diciptakan untuk menyongkong Fungsi dari perlindungan konsumen yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut. Dilatarbelakangi oleh keadaan yang menampilkan belum optimalnya penerapan perlindungan konsumen jasa keuangan ditengah-tengah globalisasi sistem keuangan dan pesatnya kemajuan dibidang teknologi informasi serta inovasi finansial yang menciptakan sistem keuangan yang kompleks, dinamis, dan saling terkait antara produk, konsumen maupun lembaganya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, **Hukum Perikatan**, alumni, Bandung , 1982
- Agus Yudha Hernoko, **Hukum Perjanjian: Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersal**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013
- Qiram Syamsudin Meliala, **Pokok – pokok Hukum Perjanjian Berserta Perkembagannya**, Liberty, Yogyakarta, 1985
- Chidir Ali, **badan Hukum**, PT.Alumni, Bandung, 2005
- Erman Radjaguguk, **Peranan Hukum di Indonesia : Menjaga Persatuan, Memulihkan Ekononi dan Memperluas Sosial** (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000)
- Herlien Budiono, **Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan**, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010
- Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia Publishing, Surabaya, 2007
- Jono, **Hukum Kepailitan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, **Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian**, Jakarta: Raja Grafindi Persada, Jakarta 2003
- Mariam Darus Badruzaman, **Kompilasi Hukum perikatan**, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2001
- Muhamad Syaifudin, **Hukum Kontrak**, Mandar Maju, Bandung, 2012
- M. Yahya Harahap. **Segi-segi dasar hukum kontrak**, Alumni, Bandung, 1982
-, **Segi – Segi Hukum Perjanjian**, Alumni, Bandung, 1986
- Nindyo Pramono, **Hukum Komersil.**: Pusat Penerbitan UT cetakan 1, Jakarta 2003
- Riduan Syahrani, **rangkuman intisari hukum**, pustaka kartini, jakarta 1991
- Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana-Prenada Media Grup, Jakarta, 2005
- Salim, **Pengnatar Hukum Perdata Tertulis (BW)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
-, **Hukum Kontrak Teori dan Teknik penyusunan Kontrak**, Sinar Grafika, Jakarta, 2003

....., **Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak**, sinar grafika, Cetakan ke 4 Jakarta, 2006

Simanjutak, **Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia**, Djambatan, Jakarta, 2007

Subekti, **Hukum perjanjian**, PT. Intermasa, Jakarta, 1987

Suharnoko, **Hukum perjanjian: Teori dan Analisa Kasus**,kencana, Jakarta, 2004

....., **Pokok-pokok Hukum Perdata**, Intermasa, Jakarta, 1987

Syahmin, **Hukum Kontrak Internasional**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006

Yusuf shafi, **Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya**,Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003

JURNAL

Otoritas Jasa Keuangan, **Booklet Perbankan Indonesia**, Jakarta , Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan Otoritas Jasa Keuangan, Edisi 1, maret 2014, ISSN : 1858 -4233, 2014

Otoritas Jasa Keuangan, **Booklet Perbankan Indonesia**, Jakarta , Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan Otoritas Jasa Keuangan, Edisi 4, maret 2017, ISSN : 1858 -4233, 2017

Badan Pembinaan Hukum Nasional. 1981, **Simposium Hukum Perdata Nasional**, Kerjasama Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 21-23 Desember

Otoritas Jasa Keuangan, **Modul Workshop Eduksi Dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan**, Jakarta , Departemen Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, 2015

Kusumaningtuti S.Soetiono, **Sambutan Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen**, Disajikan dalam Seminar Nasional Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Keuangan dalam Sektor Jasa Keuangan , Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta, 10 Maret 2015

Suyuti, **Dasar Penetapan Itikad Tidak Baik Menurut Otoritas Jasa Keuangan**, Otoritas Jasa Keuangan (wawancara), tanggal 3 desember 2015

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2011 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Nomor 01/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5431

Pertaturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor, 1/POJK.07/2014 Tentang Keberadaan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014 Tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.07/2014 Tentang Pelaksanaan Edukasi Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan Kepada Konsumen Dan/Atau Masyarakat

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.07/2014 Tentang Penyampaian Informasi Dalam Rangka Pemasaran Produk Dan/Atau Layanan Jasa Keuangan

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 Tentang Perjanjian Baku

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 Tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen